



Materialisme Sebagai Penghambat Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Mohammad Sabiq¹, Akhmad Jayadi², Imam Nawawi³ & Mohammad Wasil⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Hasanuddin

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Kalijaga

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Narotama Surabaya

Article Infortion

Article history:

Received 17 September 2018;

Received in revised form 21

December 2018; Available online

31 January 2020

ABSTRACT

Materialism and sich are the driving spirit of the community in achieving economic and financial security that saves a holistic and socially just welfare. This can be seen from the lives of people in materialistic developed countries, where the level of social stress is higher, economic inequality widens, horizontal conflict is rife. This research uses Pierre Felix Bourdieu's social theory in seeing people trust the expenditure of material with other values, such as spiritual and cultural values that are no less urgent as elements of social welfare development. This study found that materialism on the one hand has a positive effect, where people are encouraged to use material standards in measuring the level of welfare they expect. On the other hand, materialism closes the presence of values such as spirituality, local wisdom and agriculture in completing more holistic welfare standards.

Keywords: Per Capita GRDP, Human Development Index (HDI), Gini Ratio

Materialisme an sich merupakan semangat pendorong perilaku masyarakat dalam menggapai stabilitas ekonomi dan finansial namun mengancam kesejahteraan hidup yang holistik dan berkeadilan sosial. Hal itu bisa dilihat dari kehidupan masyarakat di negara-negara maju yang materialistik, dimana tingkat stress sosial lebih tinggi, ketimpangan ekonomi melebar, konflik horizontal marak. Penelitian ini menggunakan teori perilaku sosial dari Pierre Felix Bourdieu dalam melihat perilaku masyarakat memperjuangkan kesejahteraan materi dengan mengorbankan nilai-nilai lain, seperti nilai spiritual dan kebudayaan yang tidak kalah urgen sebagai elemen pembangun kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Penelitian ini menemukan, materialisme di satu sisi memberikan efek positif, dimana masyarakat terdorong untuk memakai standar-standar material dalam mengukur tingkat kesejahteraan yang mereka harapkan. Di sisi lain, materialisme menutup hadirnya nilai-nilai seperti spiritualitas, kearifan lokal dan kebudayaan dalam melengkapi standar kesejahteraan yang lebih holistik.

Kata kunci: PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini

PENDAHULUAN

Pada 16 Juli 1990, Presiden Soeharto menghadiri pembukaan Kongres VI dan Seminar Nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, bapak presiden memberikan sambutan tentang pembangunan dan kesejahteraan sosial yang tidak lagi cukup dilihat melalui perspektif materialisme an sich. Soeharto mengatakan:

“..pemahaman kebendaan dan kuantitatif saja sudah tidak memadai lagi. Pembangunan seperti itu belum tentu menghasilkan kesejahteraan dan

kebahagiaan, bahkan ternyata dapat membawa dampak sosial budaya yang kurang menguntungkan...Manusia terasa banyak kehilangan pegangan hidup..”(Effendi, Sairin, & Dahlan, 1990).

Dalam pandangan bapak presiden waktu itu, pemahaman kebendaan dan kuantitatif (materialisme) berdampak buruk terhadap hilangnya pegangan hidup manusia dalam proses pembangunan kesejahteraan. Materialisme bukan lagi menguntungkan melainkan dapat merugikan, dimana salah satu bentuk kerugian yang ditimbulkan adalah ketidakbahagiaan masyarakat

Author Correspondence:

E-mail: ¹muh.sabiq77@gmail.com, ²akhmad-jayadi@feb.unair.ac.id

³felem2imam@gmail.com, ⁴Mohammad.wasil@narotama.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i1.89>

sepanjang perjuangan menggapai kesejahteraan. Pandangan senada disampaikan oleh Soedjatmoko dalam menilai dampak negatif teknologi yang tidak terkendali terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Soedjatmoko, 1983).

Di dalam masyarakat modern, sebagaimana mudah terlihat di negara-negara maju, teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia sekaligus standar kesejahteraan mereka. Kemajuan suatu negara diukur dari kemajuan mereka dibidang sains dan teknologi, dan itu terbukti dimana negara-negara adidaya yang berkuasa atas kemajuan sains teknologi juga berkuasa atas negara-negara lain secara ekonomi dan politik. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, China dan Rusia adalah sederet contoh kecil tentang negara-negara yang maju di bidang sains dan teknologi sekaligus berkuasa atas ekonomi-politik negara-negara lain. Negara-negara superpower ini disebut kekuatan global (Hussein, 2013).

Soedjatmoko melihat bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata proses ekonomi, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan kebudayaan yang meliputi bangsa secara keseluruhan (Soedjatmoko, 1983). Dalam konteks pemikiran Soedjatmoko ini, kesejahteraan ekonomi yang berhasil diraih negara-negara super power yang menjadi simbol kekuatan global tersebut tidak bisa menjadi ukuran pembangunan sosial, terlebih jika melihat nasib negara-negara kecil yang hancur dan porak-poranda seperti Timur Tengah akibat kebijakan sosial, ekonomi dan politik negara-negara maju tersebut (Sihbudi, 2007).

Di samping dampak seperti konflik horizontal dan perang fisik (militarisme), negara-negara maju yang standarnya berupa materialisme juga kehilangan kebahagiaan hidup. Landis dan Page melihat masyarakat modern terancam penyakit mental (mental disease) yang jauh lebih parah, bahkan lebih parah dibanding efek yang ditimbulkan perang (Landis & Page, 1938). Penyakit lain yang juga parah menimpa masyarakat modern dengan standard hidup berupa materialisme adalah tingkat kriminalitas yang tinggi (Zehr, 1976).

Pembangunan ekonomi dan penggapaian kesejahteraan sosial yang lebih holistik, berkeadilan, tidak semata-mata proses ekonomi. David Korten melihat sesuatu yang lebih substansial dari sekedar melihat materialisme

sebagai satu-satunya standard, yaitu bahwa sesungguhnya pembangunan ekonomi merupakan pembangunan manusia yang seutuhnya yang seharusnya dilakukan oleh manusia (Korten, 1988). Dengan begitu, pengejaran akan kesejahteraan material tidak boleh mengabaikan nilai-nilai lain yang non-material, seperti nilai spiritual, agama, kebudayaan. Materialisme an sich menjadi penghalang bagi pembangunan kesejahteraan yang holistik dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian sosiologis ini membahas tentang perilaku sosial masyarakat yang menjadikan materialisme sebagai satu-satunya standard dalam meraih dan mengukur pencapaian kesejahteraan hidup mereka, sehingga kehilangan banyak aspek lain yang tidak kalah urgennya. Nilai-nilai urgen yang sering kali menjadi 'korban' untuk menebus kesejahteraan material tersebut adalah keadilan sosial, kepedulian, spiritualitas, kearifan lokal, dan nilai-nilai non-material lainnya. Untuk melihat perilaku sosial tersebut, penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dari Pierre Felix Bourdieu.

Melalui teorinya tersebut, Bourdieu ingin menjelaskan tentang hubungan yang kuat antara aktor atau agen sosial dengan struktur sosial, yakni hubungan yang saling mempengaruhi, memperantarai, saling bertaut dalam praktik sosial (Adib, 2012). Perilaku masyarakat sebagai agen sosial, dengan begitu, tidak bisa dilepaskan dari situasi-kondisi yang melingkupinya sebagai struktur sosialnya. Dengan kata lain, masyarakat modern yang berperilaku terlalu materialistik sehingga mengabaikan aspek-aspek penting lain yang non-materialis tidak bisa dipisahkan dari situasi sosio-politik, ekonomi dan kebudayaan, yang melingkunginya.

Bourdieu juga mengatakan bahwa sebuah aksi lahir dari respon habitus terhadap situasi (fields), dimana habitus ini ditopang oleh sejauh mata modal (capital) yang dimiliki. Nanang Krisdinanto menyajikan rumusan matematis terhadap teori Bourdieu tersebut dengan mengatakan bahwa (habitus x capitas) + Field = Practice (Krisdinanto, 2016). Perilaku masyarakat yang materialistik dalam membangun dan menggapai kesejahteraan adalah respon habitus atau kesadaran subjektif

maupun intersubjektif mereka terhadap fields atau situasi yang ada dimana mereka tinggal.

Alhasil, materialisme yang menghambat pembangunan kesejahteraan yang berorientasi keadilan sosial juga disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu yang tidak kondusif. Kondisi-kondisi ini bisa saja berupa kebijakan politik atau perilaku sosial-budaya masyarakat yang memang mendorong tumbuh suburnya paham materialisme di tengah-tengah masyarakat. Habitus masyarakat yang bercirikan materialistik mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh fields yang materialistik. Sehingga kendala pembangunan yang berorientasi kesejahteraan yang berkeadilan sosial datang dari dua arah; internal maupun eksternal; dari dalam kesadaran masyarakat maupun lingkungan masyarakat itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di awal telah ditekankan pandangan pembangunan yang menolak materialisme sebagai satu-satunya standar ukuran pencapaian. Dalam kesempatan yang lain, Soedjatmoko mencontohkan teknologi sebagai produk kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang menciptakannya. Teknologi seperti mesin hanyalah proses permulaan dari perubahan sosial. Ketika manusia telah mampu menyesuaikan diri, baik cara-cara organisasi kerja, disiplin kerja, kecepatan hidup, dan kecakapan mengendalikan mesin, maka mesin baru dapat dikatakan telah 'hidup' di masyarakat. Mesin-mesin tidak bisa dilepaskan begitu saja dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat (Soedjatmoko, 1983).

Nilai-nilai di dalam masyarakat, salah satunya, adalah nilai kebudayaan. Alfian melihat nilai kebudayaan ini sebagai acuan dari proses transformasi sosial (Alfian, 1982). Perilaku sosial yang tidak lagi mengacu pada kebudayaan hanya akan melahirkan sebuah transformasi yang merugikan. Pemikiran-pemikiran yang mendukung pendapat bahwa pembangunan ekonomi harus mengacu pada nilai-nilai juga datang dari intelektual lain seperti Robert Bellah. Dengan mencontohkan agama Tokugawa, Bellah mengatakan bahwa nilai spiritual menjadi pendorong sekaligus inspirasi tindakan ekonomi masyarakat Jepang (Bellah, 1992).

Dari tokoh-tokoh di atas, nilai agama dan nilai budaya, idealnya, tetap dapat menjadi acuan dan

rujukan bagi perilaku masyarakat dalam mengembangkan ekonomi mereka untuk meraih kesejahteraan hidup. Perilaku materialistik yang jauh dari nilai-nilai non-material seperti budaya dan agama ini menjadi momok yang mengganggu upaya-upaya pembangunan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan hidup yang holistik (Burroughs, et al., 2013).

Namun begitu, sebagian tokoh lain melihat dengan cara pandang yang kontras dan berkebalikan. Yakni, upaya membangun kesejahteraan harus murni berorientasi pada materi dengan mengikuti aturan-aturan main pasar yang materialistik. Materialisme memang sering diasosiasikan dengan perilaku masyarakat yang negatif sekali pun memiliki aspek positifnya yang tidak bisa dipungkiri (Shrum, et al., 2014). Teknologi, sebagai contoh dari produk materialisme, tidak perlu ditakuti. Teknologi memberikan dampak positif yang luar biasa terhadap manusia maupun tatanan masyarakat itu sendiri, termasuk dalam mendukung program-program ekonomi global yang berkelanjutan (Dorf, 2001).

Tanpa ada kebergantungan pada nilai-nilai di luar teknologi itu sendiri, para insinyur dan teknolog terus berupaya untuk melahirkan jenis-jenis teknologi yang, misalnya, lebih ramah lingkungan dan tidak merusak sistem ekologis. Ini yang pada akhirnya, bagi mereka, dapat mendorong terbentuknya ekonomi global yang berkelanjutan dengan mengusung prinsip green business practices atau praktek bisnis yang ramah lingkungan (Dorf, 2001). Teknologi yang merusak lingkungan dipahami sebagai bukan wujud ideal dari teknologi itu sendiri, sehingga perbaikan demi perbaikan sehingga lahir jenis-jenis teknologi yang ramah lingkungan harus terus diupayakan.

Cara pandang yang positif dan negatif terhadap teknologi, sebagai turunan dari materialisme an sich, merupakan fields atau ranah yang melingkupi perilaku sosial masyarakat dimana pun berada, terlebih di negara-negara maju maupun berkembang seperti Indonesia. Masyarakat disuguhi dua alternatif oleh struktur sosialnya sendiri; pertama, materialisme an sich yang positif, dan kedua, materialisme yang harus diberi ruh nilai-nilai non-material, seperti agama dan kebudayaan. Fields yang beragam seperti ini melanggengkan habitus atau kesadaran sebagian masyarakat yang mengamini materialisme sebagai

salah satu kebenaran yang dapat dipilih, dan hasilnya adalah perilaku sosial yang materialistik itu sendiri.

Dalam konteks global, perilaku negatif masyarakat global yang materialistik namun selalu mendapat pembenarannya sendiri adalah konflik perebutan sumber daya alam. Perebutan sumber daya alam seperti minyak dan/atau dominasi kuasa negara-negara adidaya di Timur Tengah, misalnya, adalah contoh paling konkrit untuk kasus ini (Hussein, 2013). Atau, di Indonesia, penggalangan aksi massa 22 Mei 2019 sebagai respon sosial-politis terhadap Keputusan KPU tentang Pemenang Pilpres, juga merupakan contoh paling kontemporer tentang nalar yang terlalu materialistik. Perilaku yang materialistik an sich pada akhirnya juga merugikan secara ekonomi (Putra, 2019).

Berangkat dari pandangan Alfian yang mengatakan, perkembangan rasio yang terutama bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan materi kadang-kadang melahirkan sifat-sifat persaingan yang tidak terkendali, yang muncul dalam corak-corak yang tidak berperikemanusiaan, seperti penindasan manusia oleh manusia atau penghisapan manusia oleh manusia (Alfian, 1982). Ini berarti, materialisme an sich harus diminimalisir dan selalu dipayungi oleh nilai-nilai yang berpihak pada kemanusiaan, kemajuan dan peradaban.

Beberapa hal yang perlu ditempuh. Pertama, perbaiki kesadaran (habitus) sosial masyarakat. Tahap pertama ini adalah tahapan paling penting, karena berdasarkan teori dari Bourdieu merupakan bagian penting lahirnya tindakan sosial (Krisdinanto, 2016). Penting disadari bahwa materialisme an sich merupakan penghambat pembangunan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, bahkan menjadi pencetus lahirnya kerugian baik secara materiil maupun spirituil-moril.

Kedua, optimalisasi modal-modal yang ada di tengah masyarakat, sehingga tercipta struktur sosial yang kondusif untuk pembentukan kesadaran tentang materialisme yang lebih 'manusiawi'. Beberapa modal dalam teori Bourdieu adalah modal sosial, modal syimbolik, modal kultural, dan lainnya (Krisdinanto, 2016). Dengan kata lain, nilai-nilai spiritual, agama, kearifan lokal, dan budaya harus selalu menyertai pikiran dan

tindakan masyarakat dalam mengejar pembangunan dan kesejahteraan ekonomi-finansial.

Ketiga, struktur sosial yang kondusif harus ditopang oleh berbagai kebijakan pemerintah, sehingga dukungan politis ini menjadi penguat bagi terbentuknya struktur sosial yang kondusif. Dalam artian, pemerintah harus 'turun tangan' dengan melahirkan kebijakan-kebijakan politis yang memasukkan prinsip-prinsip nilai ke dalam praktek ekonomi dan program pembangunan maupun kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Di awal telah ditekankan pandangan pembangunan Kesejahteraan adalah tujuan banyak orang. Namun, jenis kesejahteraan material atau non-material lebih subjektif. Dalam artian, tidak semua orang mengejar kesejahteraan material di sepanjang hidup mereka. Sehingga perilaku sosial mereka tidak mengarah pada pencapaian kesejahteraan material an sich. Sebagian dari kelompok sosial menaruh perhatian yang serius terhadap nilai-nilai, sehingga perilaku sosial mereka dalam meraih kesejahteraan selalu dibayang-bayangi oleh nilai-nilai yang non-material.

Paham materialisme adalah suatu perkara yang paling urgen dalam melihat perilaku sosial, sebab ia menjadi bayang-bayang kesadaran dalam habitus masyarakat. Materialisme ini mengandung dua potensi yang seimbang antara negatif maupun positif. Sebagian kalangan melapisi materialisme ini dengan nilai-nilai non-material guna mencegah potensi negatif yang mungkin ditimbulkannya. Karena itulah, selalu mudah dijumpai perilaku masyarakat yang selalu mempertimbangkan aspek nilai-nilai non-material, seperti moral dan spiritual, dalam mengejar impian dan kesuksesan materialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2012). Agen dan Struktur dalam Pandangan Bourdieu. *Jurnal BioKultur*, 1 (2), 91-110.
- Ahmad, T. A. (2016). Kampanye dan Pertarungan Politik di Jawa Tengah Menjelang Pemilihan Umum 1955. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26 (1), 45-61.
- Alfian. (1982). *Politik, Kebudayaan dan Manusia*

- Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Atmojo, S. D. (2013, Desember 26). Masalah Kependudukan di Indonesia sebagai Negara Berkembang. Dipetik Mei 16, 2019, dari Sosial Budaya: <http://www.kompasiana.com>
- Bellah, R. N. (1992). *Religi Tokugawa: Akar-akar Budaya Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Burroughs, J. E., Chaplin, L. N., Pandelaere, M., Norton, M. I., Ordabayeva, N., Gunz, A., et al. (2013). Using Motivation Theory to Develop a Transformative Consumer Research Agenda for Reducing Materialism in Society. *Journal of Public Policy and Marketing*, 32 (1), 18-31.
- Dorf, R. C. (2001). *Technology, Humans, and Society: toward a Sustainable World*. California: Academic Press.
- Effendi, S., Sairin, S., & Dahlan, M. A. (1990). *Pembangunan Kualitas Manusia: Suatu Perspektif*. Dalam S. Effendi, S. Sairin, & M. A. Dahlan, *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan* (hal. XV). Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Fauzi, A. (2019, April 9). Jokowi : Suara Jateng Penentu Kemenangan. Dipetik Mei 16, 2019, dari <https://mediaindonesia.com>
- Hussein, S. (2013). Eksistensi Amerika Serikat Sebagai Kekuatan Global. *Global and Policy*, Vol. 1, No. 1, 84-91.
- Intensia. (2015, Desember 26). Permasalahan Kependudukan di Indonesia. Dipetik Mei 16, 2019, dari <http://intensia.blogspot.com>